



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu mengatur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2014.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011-2015.
10. Kebijakan Umum Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2013.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2013.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2014.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika RKPD terdiri atas :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI PENUTUP

BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2014 tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kerangka Ekonomi, Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja, Pendanaan dan Kebijakan Umum Anggaran serta Lampiran Matrik Program Prioritas Tahun 2014 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015, yang pada prinsipnya merupakan penjabaran dari agenda kerja Bupati Lampung Selatan terpilih untuk masa jabatan 2011-2015.

- (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2014 sebagai bahan Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014, setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam melakukan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014 yang kemudian dituangkan dalam RAPBD.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014 hasil pembahasan bersama DPRD, sebelum dituangkan kedalam RAPBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran yang berisi uraian tugas tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Bappeda dalam rangka menganalisis dan mengevaluasi usulan rencana kerja tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 25

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dapat disusun.

Dokumen RKPD ini disusun sebagai sarana penyampaian informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan dan akhir dari pelaksanaan ini semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 dimana dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 mengacu kepada program lima tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2011-2015.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Tahun 2014 tentunya memuat berbagai rencana prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi serta kerangka anggaran.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat baik itu dasar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

maupun Surat Edaran Bersama. Namun hasil yang diinginkan secara maksimal masih belum dapat dicapai mengingat dokumen ini merupakan dokumen daerah yang proses pembuatannya melalui mekanisme yang sangat panjang dengan melibatkan berbagai unsur dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Diharapkan program kerja yang telah dan sementara dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu saja terlalu dini untuk mengatakan *impact*-nya kepada masyarakat sudah berhasil. Namun itulah yang memacu eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder agar tidak puas dahulu dengan apa yang sudah ada sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana seluruh kekuatan ini dapat bersatu untuk merespon seluruh hambatan yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus menjadi alat ukur internal bagi penyelenggara pemerintahan dan menjadikannya *strength of spirit* bagi kita semua untuk selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi.

Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 ini kami sampaikan banyak terimakasih dan semoga kita semua mendapat rahmat serta kekuatan dari Allah SWT untuk membangun daerah ini.

Kalianda, 2013
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	3
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	3
1.5 Maksud dan Tujuan	4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	5
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	5
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	5
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	9
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	11
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	14
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	27
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	17
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	19

BAB III	RANCANGAN KERANGKA OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	21
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	21
3.1.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah pada Tahun sebelumnya	21
3.1.2	Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2014.....	29
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	30
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	31
3.2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	31
3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	33
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	35
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	36
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	36
4.2	Prioritas dan Pembangunan	43
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	45
BAB VI	PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Lampung Selatan	10
Tabel 2.	Data Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan	12
Tabel 3.	Perbandingan APBD dan Realisasi APBD TA 2012	14
Tabel 4.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2012	15
Tabel 5.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007-2012.....	24
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan (%) Tahun 2007-2012	24
Tabel 7.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Persen)	25
Tabel 8.	PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2012 (Rupiah/jiwa)	27
Tabel 9.	Perkembangan Laju Inflasi di Kota Kalianda Tahun 2012	29
Tabel 10.	Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014	30
Tabel 11.	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2014	32
Tabel 12.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2012 s.d tahun 2014	34
Tabel 13.	Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 s.d tahun 2014	35
Tabel 14.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan Visi, Misi Kabupaten Lampung Selatan	36
Tabel 15.	Program Unggulan Per Kecamatan dan Instansi Penanggungjawab	42
Tabel 16.	Prioritas Pembangunan Daerah	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Indeks Pembangunan Manusia	11
Gambar 2.	PDRB Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 – 2011 (dalam jutaan rupiah)	22
Gambar 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006-2011.....	24
Gambar 4.	Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008–2011 (Persen)	26
Gambar 5.	PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008–2012 (Rupiah/jiwa)	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 dengan mengacu kepada RKP 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2014 memuat langkah-langkah untuk mendukung **TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN** yang menjadi Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dalam RPJMD 2011-2015. RKPD tahun 2014 merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penyusunan RKPD Tahun 2014 dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penyusunan Perbup RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom-up dan top-down, hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun

perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari Kelurahan/ Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 dengan mengacu kepada RKP 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang,
2. Dasar Hukum Penyusunan,
3. Hubungan antar Dokumen,
4. Sistematika Dokumen RKPD,
5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
2. Proritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP



1.5 Maksud dan Tujuan

RKPD tahun 2014 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD; selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Ranperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

- a) Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b) Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2014 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
- c) Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2014;
- d) Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2011-2015 sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
- e) Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.



BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis.

Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara pelabuhan Bahauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 Km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 Kecamatan dan 260 Desa/Kelurahan (256 Desa dan 4 Kelurahan) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara demografis Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luas kurang lebih 2.109,74 Km dengan Pusat pemerintahan di Kota Kalianda. Kecamatan Natar sebagai kecamatan terluas, yaitu 250,88 Km². Dari luas keseluruhan Kabupaten Lampung Selatan tersebut, 44.847 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 155.854 Ha merupakan lahan bukan sawah. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah tadah hujan dengan satu kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah ladang/huma.

Kabupaten Lampung selatan memiliki banyak pulau besar maupun kecil diantaranya pulau Krakatau, pulau Sebesi, pulau Sebuku, pulau Rimau, pulau Kandang, pulau Rakata Tua dan pulau Legundi. Kabupaten Lampung Selatan juga mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 m, juga memiliki beberapa sungai antara lain Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal, pada umumnya sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk irigasi persawahan (pertanian).

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 912.490 jiwa, terdiri dari 470.303 laki-laki dan 442.187 perempuan, dari jumlah tersebut, sebagian besar memeluk agama Islam 95,81%, kemudian menyusul berturut-turut agama Hindu 1,20%, agama Protestan 1,01%, kepercayaan lainnya 0,97%, agama Katolik 0,76%, dan agama Budha 0,25%.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis, dengan curah hujan rata-rata 161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari/bulan. Temperaturnya berselang antara 21,30C - 33,00 C. Selang kelembaban relatifnya adalah antara 39,0% sampai dengan 100,0%. Sedangkan tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Lampung Selatan adalah 1007,4 Nbs dan 1013,7 Nbs. (LSDA Kabupaten Lampung Selatan, 2012).

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang

berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- ***Tanah Latosol***

Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-merahan adalah hasil pelapukan bahan induk kompleks turfin medier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

- ***Tanah Podsolid***

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimenbatuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolid berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.

- ***Tanah Andosol***

Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk kompleks turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai coklat kuning. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- ***Tanah Hidromorf***

Tanah Hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai enter medier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

- ***Tanah Alluvial***

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki Kawasan Hutan Suaka/Taman/Lahan suatu kawasan yang cukup luas. Secara garis besar kawasan hutan di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- Kawasan Hutan Lindung : 47.436,50 ha.
- Kawasan Hutan Produksi Tetap : 54.896,76 ha
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi : 54.071,00 ha
- Jumlah : 156.405,26 ha.

Selain dari beberapa potensi yang diuraikan di atas, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki potensi wilayah yang perlu dikembangkan, antara lain :

- **Bidang Perikanan**

Dalam bidang perikanan laut Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang cukup besar, dimana Kabupaten Lampung Selatan memiliki panjang garis pantai 180 Km, dengan luas perairan laut 173.347 Ha. Potensi sumberdaya ikan di perairan laut sebesar 74.885 ton per tahun, sedangkan hasil tangkap baru mencapai 35.145 ton. Sedangkan yang belum mampu dimanfaatkan yaitu 39.740 ton. Demikian juga perikanan perairan payau terutama untuk tambak di Kecamatan Ketapang dan Kalianda, Perikanan air tawar yaitu di Kecamatan Penengahan, Palas, Seragi dan Tanjung Bintang.

- **Bidang Pertanian**

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan yaitu padi, jagung, pisang, kelapa, kelapa sawit, kakao, yang tersebar di kecamatan Palas, Seragi, Ketapang, Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Candipuro, Ketibung, Tanjungsari, dan Way Sulan.

- **Bidang Pariwisata.**

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang cukup besar di bidang Pariwisata, baik wisata alam pegunungan, wisata pantai dan bahari maupun wisata budaya, seperti pemandian air panas Belerang, Gunung Rajabasa, Gunung Krakatau, Pulau Sebuku, Pantai Canti, Pantai Kahai, Banding Resort, Pantai Leguna, Pantai Merak Belantung, Kalianda Resort, Menara Siger, Tabek Indah, Taman Makau Pahlawan Radin Intan, dan lain-lain. Tersebar pada Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Bakauheni, dan Natar.

- **Bidang Industri**

Beberapa Kecamatan telah ditetapkan beberapa sebagai pusat kegiatan industri, antara lain Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Ketibung. ³

- **Bidang Pertambangan**

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi dibidang pertambangan yang perlu dikembangkan antara lain marmer di Kecamatan Natar, granit dan biji besi di Kecamatan Tanjung Bintang, andesit di Kecamatan Katibung, Bakauheni dan Rajabasa, zeolit di Kecamatan Sidomulyo, dan pasir besi di Kecamatan Rajabasa, selain itu juga Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi dibidang sumber daya energi panas bumi (Geothermal) di Gunung Rajabasa, meliputi 4 kecamatan yaitu Kalianda, Rajabasa, Penengahan dan Bakauheni.

Selanjutnya selain potensi daerah yang perlu untuk dikembangkan, beberapa Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki potensi terkena bencana alam seperti tsunami dan banjir antara lain Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Katibung. Sedangkan yang berpotensi banjir adalah Kecamatan Palas, Kecamatan Natar dan Kecamatan Candipuro (sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kemakmuran penduduk adalah pendapatan regional perkapita penduduk, karena itu untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya dapat dilihat melalui pendapatan regional perkapita Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Lampung Selatan.

TAHUN	PDRB PERKAPITA ADHB (Rp.)	PDRB PERKAPITA ADHK (Rp.)
2008	8.459.745,00	4.392.061,00
2009	9.879.182,00	4.563.808,00
2010	11.192.852,00	4.767.223,00
2011	12.202.270,00	5.000.612,00
2012*	12.500.000,00	5.500.000,00

*Angka sangat sementara

Sumber : Lampung Selatan Dalam Angka, diolah tahun 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan periode tahun 2008-2012 berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp.4.844.740,00 dan berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 10.846.809,00 Trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan periode tahun 2008-2012 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku.

Selain itu dapat diuraikan prosentase penduduk Kabupaten Lampung Selatan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2011 yaitu terdapat 19,23 % penduduk miskin dari jumlah penduduk sebesar 922.397 jiwa.

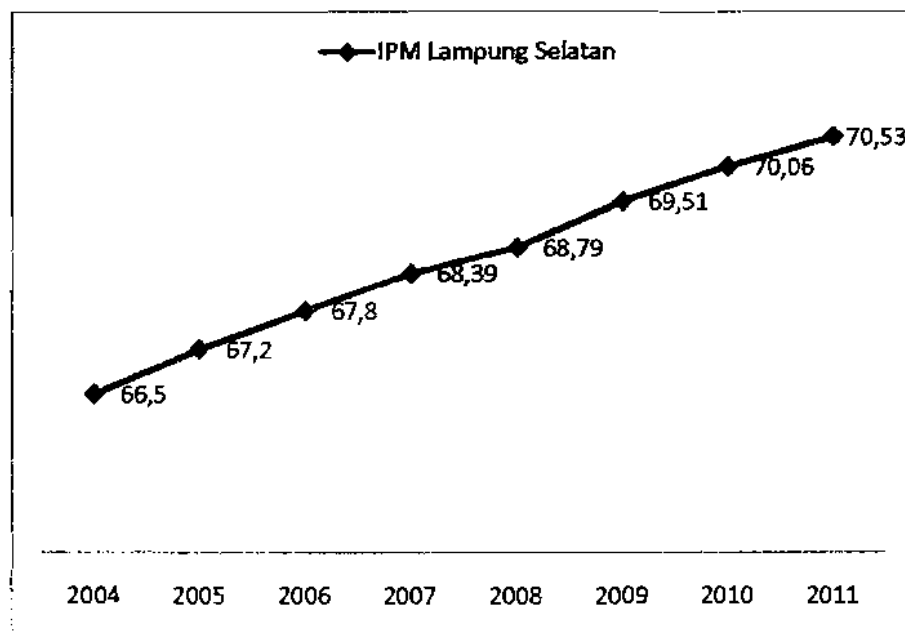
Selanjutnya berdasarkan rekapitulasi data Keluarga Sejahtera-Prasejahtera di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011, terdapat:

Keluarga Pra Sejahtera : 107.784 KK (43,15 %)
 Keluarga Sejahtera I : 59.171 KK (23,69 %)
 Keluarga Sejahtera II : 51.788 KK (20,73 %)
 Keluarga Sejahtera III : 28.831KK (11,54 %)
 Keluarga Sejahtera III Plus : 2.195KK (0,88 %)

(Sumber : BPPKB Kabupaten Lampung Selatan, 2012).

Selain Pendapatan Regional Perkapita sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dilihat juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan. IPM adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pembangunan yang menggunakan pradigama *"Human Centered Development"*. Adapun IPM Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagaimana garafik berikut ini.

Gambar 1
Indeks Pembangunan Manusia



Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 yang akan datang diharapkan target yang ditetapkan yaitu 71,00 dapat tercapai.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dasar, dan rujukan serta pembangunan yang berkaitan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat, dalam rangka itu semua telah tersedia beberapa fasilitas mendukung yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

a. Bidang Pendidikan

Data pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2. Data Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan 2011

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket.
1	SD	478	3.341	1.511 (45,23 %)	1.094 (32,74 %)	736 (22,03 %)	
2	MI	122	843	701 (83,16%)	71 (8,42%)	71 (8,42%)	
3	SMP	137	778	647 (83,16%)	84 (10,80 %)	47 (6,04 %)	
4	MTs	88	376	321 (85,37 %)	34 (9,04 %)	21 (5,59 %)	
5	SMA	45	254	210 (82,68 %)	37 (14,57 %)	7 (2,76 %)	
6	MA	17	88	70 (79,55 %)	13 (14,77 %)	5 (5,68 %)	
7	PT	5	-	-	-	-	-

Sumber : Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012.

Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa fasilitas yang tersedia dalam keadaan baik, SD =45,23%, SMP =83,16%, SMA = 82,68%. Ini menunjukkan pelayanan umum di bidang pendidikan cukup baik.

Selanjutnya bila dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai APK pada tahun 2011 sebagai berikut, SD(103,40), SMP(80,16) dan SMA (64,69).

Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk dalam usia yang sama yaitu sebagai berikut: SD (89,41), SMP(59,73) dan SMA(41,30) (Sumber : TNP2K, 2012).

Berkaitan dengan penganggaran biaya pendidikan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menganggarkan biaya pendidikan di atas 20% dalam APBD setiap tahun, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2010 s/d 2013 Pemerintah Daerah telah

memprogramkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Daerah dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin sekolah.

b. Bidang Kesehatan

Dalam rangka mendukung pelayanan dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah 1 Unit, Rumah Sakit Swasta 1 Unit, Puskesmas Induk 24 Unit, Puskesmas Pembantu 76 Unit, Apotek 21 Unit, Posyandu 936 Unit, Balai Pengobatan/Klinik 60 Unit, Dokter Spesialis 4 orang, Dokter Umum 62 orang, Dokter Gigi 13 orang, Bidan 488 orang, Perawat 296 orang, Kefarmasian 47 orang, Tenaga Gizi 16 orang, Tenaga Kesmas 85 orang, Tenaga Sanitasi 32 orang dan Tenaga Teknis Medis 38 orang. Dalam rangka menjamin pembiayaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Lampung Selatan, telah dilaksanakan program Jamkesda dan Jamkesmas.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah berhubungan dengan beberapa fakta umum tentang Kabupaten Lampung Selatan, yang membedakan Kabupaten Lampung Selatan dengan daerah lain yang berada di sekitarnya, yaitu:

- a) Merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan Provinsi Lampung dari Arah Selatan dari pulau Jawa yaitu dengan adanya pelabuhan Bakauheni. Demikian juga sebelah barat dengan adanya Bandara Radin Intan II di Kecamatan Natar.
- b) Jumlah Penduduk yang besar yaitu pada tahun 2012 mencapai $\pm 1.200.075$ Jiwa, maka apabila mampu dikembangkan dan dimanfaatkan, maka merupakan sumber daya yang handal dalam mendukung pembangunan daerah.
- c) Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi unggulan daerah yang tidak semua dimiliki oleh Kabupaten Lain yang ada di Propinsi Lampung atau Provinsi lainnya di Indonesia, seperti Sektor pertanian, Perkebunan Perikanan, peternakan, Pariwisata dan Pertambangan merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan. Dimana kesemua itu didukung dengan program-program pembangunan

dan pengembangan wilayah seperti adanya Kawasan Industri KAIL Tanjungbintang, Kawasan Industri Ruguk, Rencana Pembangunan Terminal Agrobisnis di Kecamatan Bakauheni, Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni, Babatan dan Natar, Penetapan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Bandara Radin Inten II dan Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Ini semua merupakan potensi yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan daya saing daerah Kabupaten Lampung Selatan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2012 dan Realisasi RPJMD

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diuraikan di atas, didukung oleh sumber dana yang berasal APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

Tabel.3. Perbandingan APBD dan Realisasi APBD 2012

uraian	Anggaran (Perubahan)	Realisasi 2012	Selisih	%
1	2	3	4= 3-2	5=3/2x100
1. Pendapatan	1.100.817.212.408,4 6	1.128.938.087.696,0 5	28.120.875.287,55	102,55
2. Belanja	1.178.211.890.696,6 8	1.116.736.049.048,0 0	(61.475.841.648,68)	94,78
3. Surplus (deficit)/ (1-2)	(77.394.678.288,22)	12.202.038.648,05		(15,77)
Pembiayaan:				
4. Penerimaan Pembiayaan	85.239.543.351,22	85.251.543.351,22	12.000.000	100,01
5. Pengeluaran Pembiayaan	7.924.865.063,00	7.366.730.653,00	(558.134.410)	92,96
6. Pembiayaan Netto (5-6)	77.314.678.288,22	77.884.812.698,22	570.134.410	11,74
7. SILPA Tahun Berjalan (3+6)	(80.000.000)	90.086.851.346,27		

Kinerja keuangan daerah tahun 2012, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KINERJA PENDAPATAN

- a) Realisasi pendapatan selama tahun 2012 sebesar Rp. 1.128.938.087.696,05 atau sebesar 102,55% dari anggarannya sebesar Rp. 1.100.817.212.408,46;
- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mampu menyumbang pendapatan daerah tahun 2012 sebesar Rp. 80.245.882.369,74 atau hanya sebesar 7,11% dari total realisasi pendapatan tahun 2012 Rp. 1.128.938.087.696,05. Realisasi PAD dibanding anggarannya selama tahun 2012 adalah Pendapatan Pajak Daerah 152,56%, Pendapatan Retribusi Daerah 95,74%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 104,70%, dan Lain-lain PAD 192,41% seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2012

	Jenis PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	19.278.373.000	29.411.978.646,5	152,56
2	Pendapatan Retribusi Daerah	33.831.217.750	32.391.535.626	95,74
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.016.855.825	5.252.537.097	104,70
4	Lain-lain PAD	6.855.163.100	13.189.831.000	192,41
	Jumlah	64.981.609.675	80.245.882.369,74	123,49

Pencapaian realisasi jumlah PAD dibawah 100% hanya pada Pendapatan retribusi Daerah yakni sebesar 95,74%.

Belum tercapainya target PAD tersebut disebabkan antara lain:

- a. Belum sepenuhnya Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pendapatan daerah tersosialisasi kepada masyarakat;
- b. Sulitnya menerapkan sanksi hukum kepada wajib pajak/retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;

- c) Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dalam menyumbang pembiayaan pembangunan yaitu sebesar Rp. 857.480.062.821,- atau 75,95% dari total realisasi pendapatan tahun 2012 sebesar Rp. 1.128.938.087.696,05. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan dibanding target yang ditetapkan tercapai sebesar 99,92%;
- d) Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar Rp. 41.643.000.000,- atau 3,69% dari total realisasi pendapatan tahun 2012 sebesar Rp. 1.128.938.087.696,05.

2. KINERJA BELANJA, terdiri dari :

- a) Realisasi belanja selama tahun 2012 sebesar Rp. 1.116.736.049.048,- atau sebesar 94,78% dari anggarannya sebesar Rp. 1.178.211.890.696,68; dan
- b) Belanja pegawai merupakan porsi terbesar dalam struktur APBD yaitu sebesar Rp. 619.626.928.647,- atau sebesar 55,49% dari total realisasi belanja sebesar Rp. 1.116.736.049.048.

INFORMASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

I. PENDAPATAN	Rp.	1.132.549.066.668,00
a. PAD	Rp.	74.061.773.525,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	888.534.414.387,68
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	169.952.878.756,00
II. BELANJA DAERAH	Rp.	1.132.358.540.128,68
a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	674.507.674.148,68
1. Belanja Pegawai	Rp.	638.470.686.568,00
2. Belanja Bunga	Rp.	
3. Belanja Subsidi	Rp.	20.000.000,00
4. Belanja Hibah	Rp.	9.048.157.500,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.808.654.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.	
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	22.109.042.000,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.015.134.080,68

b. Belanja Langsung	Rp.	457.850.865.980,00
1. Belanja Pegawai	Rp.	52.011.235.768,00
2. Belanja Barang & Jasa	Rp.	208.857.261.070,00
3. Belanja Modal	Rp.	196.982.369.142,00
III. PEMBIAYAAN	Rp.	26.919.611.460,00
1. Penerimaan	Rp.	13.364.542.460,00
2. Pengeluaran	Rp.	13.555.069.000,00

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh isu-isu global dan regional, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan menjadi isu strategis pembangunan yang mempertimbangkan Arah Kebijakan Umum Tahun 2014.

Isu-isu global dan regional, diantaranya :

- a) Perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 di negara berkembang dari 6,2% menjadi 5,4%;
- b) Perlambatan perekonomian dunia yang berdampak terhadap lambatnya permintaan terhadap produk ekspor Indonesia;
- c) Kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL);
- d) Peningkatan investasi dan kualitas belanja modal untuk mestimulus sektor riil;
- e) Peningkatan ketahanan energi (surplus neraca perdagangan minyak bumi yang semakin tipis);
- f) Dukungan terhadap pembangunan Jembatan Selat Sunda, Terminal Agribisnis, Jalan tol, Pembangunan Kota Baru, Kail dan Kawasan Krakatau;

- g) Peningkatan iklim investasi dan usaha (*Ease of Doing Business*);
- h) Percepatan pembangunan infrastruktur: *Domestic connectivity*;
- i) Peningkatan pembangunan industri diberbagai koridor ekonomi;
- j) Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda;
- k) Peningkatan daya tahan ekonomi;
- l) Peningkatan ketahanan pangan: Pencapaian surplus beras 10 juta ton;
- m) Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi;
- n) Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat;
- o) Peningkatan pembangunan sumberdaya manusia;
- p) Percepatan pengurangan kemiskinan;
- q) Pemantapan stabilitas sosial;
- r) Pemilu legislatif dan Pilpres 2014;
- s) Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; dan
- t) Percepatan pembangunan *Minimum Essential force*.

Sejalan dengan isu dan permasalahan mendesak di tingkat Nasional dan Provinsi serta mendukung upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Selatan yaitu: **"TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN "**, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 adalah perwujudan dari misi Kabupaten Lampung Selatan yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2011–2015 sebagai berikut:

- a) **Memperkuat daya dukung infrastruktur wilayah dan pemerataan pembangunan antar kawasan;**
- b) **Memperluas akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penyanggah masalah sosial, keluarga berencana dan pengarusutamaan gender;**
- c) **Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan;**
- d) **Meningkatkan swasembada pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan;**
- e) **Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan produk unggulan Kecamatan;**

- f) Peningkatan efektifitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan penanggulangan bencana alam;
- g) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- h) Pengembangan sektor industri, perdagangan, dan UMKM melalui peningkatan investasi daerah dan perluasan kesempatan kerja;
- i) Peningkatan peran kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif serta meningkatkan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya;
- j) Peningkatan iklim yang kondusif bagi kehidupan umat beragama, sosial kemasyarakatan, budaya, hukum dan politik; dan
- k) Peningkatan kinerja pelayanan pemerintah dan reformasi birokrasi (SDM, manajemen, sarana prasarana, e government dan kesejahteraan aparatur.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, identifikasi permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain disebabkan karena:

- a) Belum berkembangnya infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan sosial;
- b) Belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat guna menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan;
- c) Masih rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- d) Belum maksimalnya masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia;
- e) Belum meningkatnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- f) Belum meningkatnya supremasi hukum guna menciptakan masyarakat yang demokratis;
- g) Belum terwujudnya pemerintahan yang bersih, berorientasi kemitraan, dan bertatakelola yang baik;
- h) Kurangnya sarana infrastruktur dan penunjang kegiatan perkantoran;

- i) Sistem informasi masih bersifat manual dan belum optimalnya kinerja sebagian fungsi struktur organisasi yang ada; dan
- j) Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama pos belanja pembanunan dan kualitas SDM.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBUAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya merupakan salah satu acuan dalam melihat kerangka ekonomi makro daerah. Untuk melihat perkembangan perekonomian daerah, terdapat beberapa indikator ekonomi secara makro yang dapat dilihat antara lain menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angka Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Laju Inflasi.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan angka PDRB Kabupaten Lampung Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Pasca pemekaran wilayah, PDRB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan trend positif dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012 diharapkan mencapai angka Rp. 12.500.000.000,- (dua belas koma lima trilliun rupiah) dan PDRB Atas dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima trilliun rupiah).

tabel 5

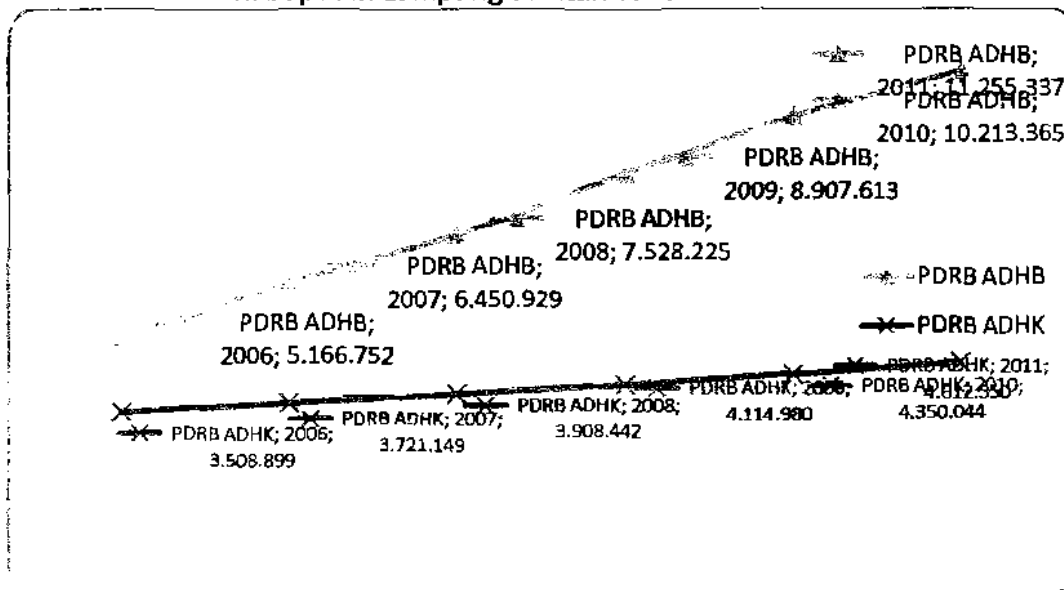
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Juta Rupiah)
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007–2012

TAHUN	PDRB (juta rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB (juta rupiah) Atas Dasar Harga Konstan
2007	6.450.929,00	3.721.149,00
2008	7.528.225,00	3.908.442,00
2009	8.907.613,00	4.114.980,00
2010	10.213.365,00	4.350.044,00
2011	11.255.337,00	4.612.550,00
2012	12.500.000,00	5.000.000,00

Sumber : Kantor BPS Lampung Selatan, 2012

Gambar 2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Juta Rupiah)
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006–2011



Sumber : Kantor BPS Lampung Selatan, 2012

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sebelum Tahun 2008, perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2005–2007 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang selalu lebih besar dari angka pertumbuhan tahun sebelumnya. Namun pada Tahun 2008 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan lebih lambat dari angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2007. Lambatnya pertumbuhan ekonomi ini juga serupa terjadi baik dalam skala regional dan nasional, hal ini merupakan dampak dari krisis keuangan global yang terjadi pada Tahun 2008 yang juga secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Namun yang cukup menggembirakan bahwa perbaikan kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Selatan semakin terus meningkat, yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Tahun 2012 yang dapat mencapai 6,2%.

Dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang mungkin timbul dari berbagai krisis keuangan dan perekonomian global seperti melambungnya harga minyak dunia, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah, utamanya adalah memperkuat basis pondasi bangunan perekonomian kabupaten terutama di sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian). Karena dominasi sektor primer diharapkan dapat menyebabkan perekonomian daerah dapat tetap tumbuh positif ditengah kelesuan perekonomian nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan kapasitas daerah, yang berarti kemampuan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan output semakin meningkat. Peningkatan kapasitas ini terkait dengan daya dukung teknologi, modal, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia serta ketersediaan sumber daya alam.

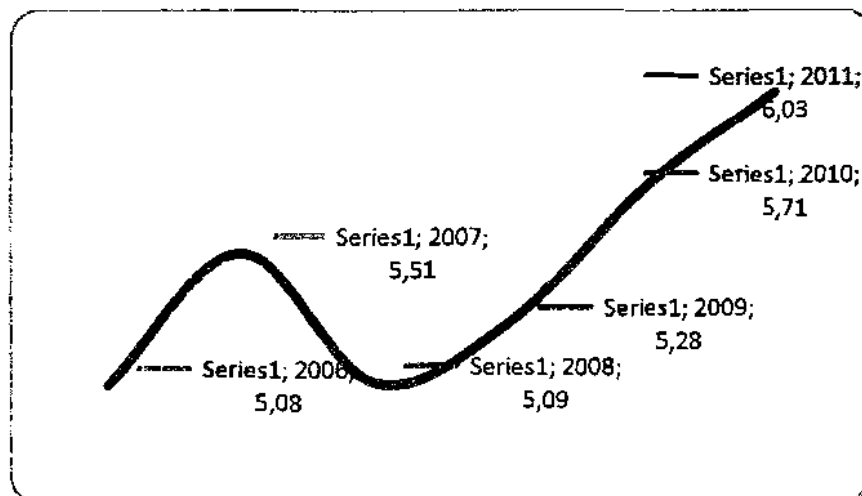
Tabel 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan (%)
Tahun 2007–2012

TAHUN	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	5,51
2008	5,09
2009	5,28
2010	5,71
2011	6,03
2012*	6,2

* Angka sangat sementara

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2012

Gambar 3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan (%)
Tahun 2006-2011



Sumber : Kantor BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2012

c. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Persentase sumbangan sektor-sektor perekonomian yang terbagi kedalam 9 (sembilan) jenis lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan secara rinci dapat digambarkan dalam Tabel 7.

Tabel 7

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008–2012 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	46,99	47,99	46,29	45,43
2	Penggalian	1,01	0,88	0,83	0,93
3	Industri Pengolahan Non Migas	8,80	9,14	10,28	10,73
4	Listrik dan Air Bersih	0,47	0,47	0,48	0,51
5	Konstruksi	6,07	5,89	6,17	6,50
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,51	10,27	10,94	10,77
7	Transportasi dan Komunikasi	12,13	12,68	12,38	13,01
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,02	4,68	4,31	4,08
9	Jasa-Jasa	9,00	8,00	8,32	8,04
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012

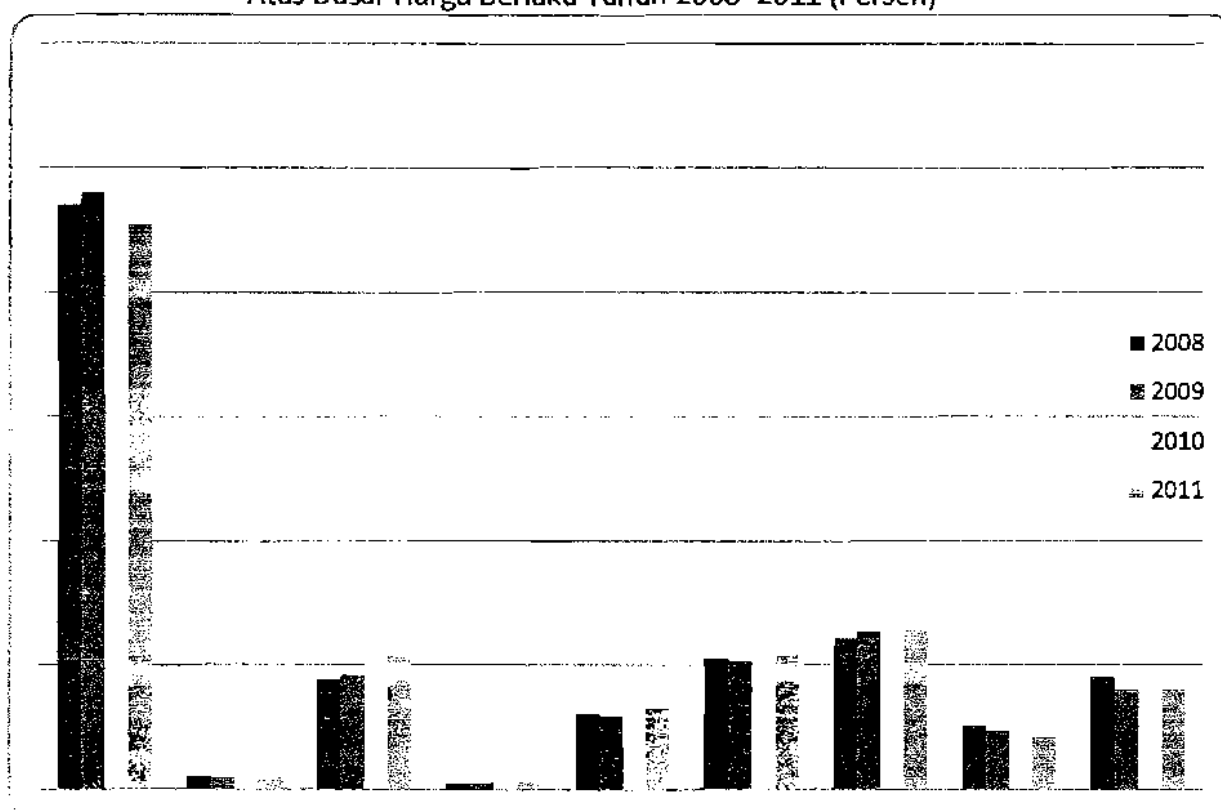
Dalam empat tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor transportasi dan komunikasi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selama kurun waktu 2008-2012, lebih dari 45 persen struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan berasal dari sumbangan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan kehutanan. Kemudian sektor transportasi dan komunikasi memberi sumbangan lebih dari 12 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih dari 10 persen. Adapun sumbangan dari sektor listrik dan air bersih merupakan yang terkecil, diikuti sektor penggalian dimana selama kurun waktu 2008-2012 sumbangannya tidak mencapai 1 persen.

Dari Tabel 3 di atas juga terlihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2012 sedikit lebih kecil dari Tahun 2011, namun dari sisi nilai PDRBnya pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.113.798.000.000,- atau meningkat sebesar Rp. 386.189.000.000,- (meningkat 8,17%) dari Tahun 2011.

Satu hal yang cukup menggembirakan terhadap perkembangan sektor pembentuk perekonomian daerah adalah terus meningkatnya perkembangan sektor industri pengolahan non migas, dimana pada Tahun 2011 peranannya sebesar 10,73 persen. Diharapkan dengan meningkatnya perkembangan sektor industri pengolahan non migas, maka hasil atau produk dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memang banyak dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diolah lebih lanjut atau dapat dimanfaatkan di sektor industri baik industri kecil, menengah, maupun besar sehingga nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Gambar 4

Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011 (Persen)



Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012

Dari gambar 3 di atas dapat terlihat bahwa selama empat tahun terakhir (2008-2011) terlihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, hal ini menunjukkan bahwa

sektor tersebut masih menjadi sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dapat diperoleh berdasarkan angka PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk. Satu kelemahan dalam perhitungan PDRB perkapita adalah tidak mencerminkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat karena perhitungannya secara akumulasi.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2011 berjumlah Rp. 12.202.270,-/jiwa, meningkat sebesar Rp. 1.009.418,-/jiwa atau meningkat 9,02 persen dari Tahun 2010. PDRB perkapita juga dapat mencerminkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, dimana jika PDRB perkapita besar bisa diasumsikan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di Kabupaten Lampung Selatan juga besar, diharapkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2012 mencapai Rp. 12.500.000,00.

Tabel 8
PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2008–2012 (Rupiah/jiwa)

TAHUN	PDRB per Kapita ADHB	PDRB per Kapita ADHK
2008	8.459.745,00	4.392.061,00
2009	9.879.182,00	4.563.808,00
2010	11.192.852,00	4.767.223,00
2011	12.202.270,00	5.000.612,00
2012*	12.500.000,00	5.500.000,00

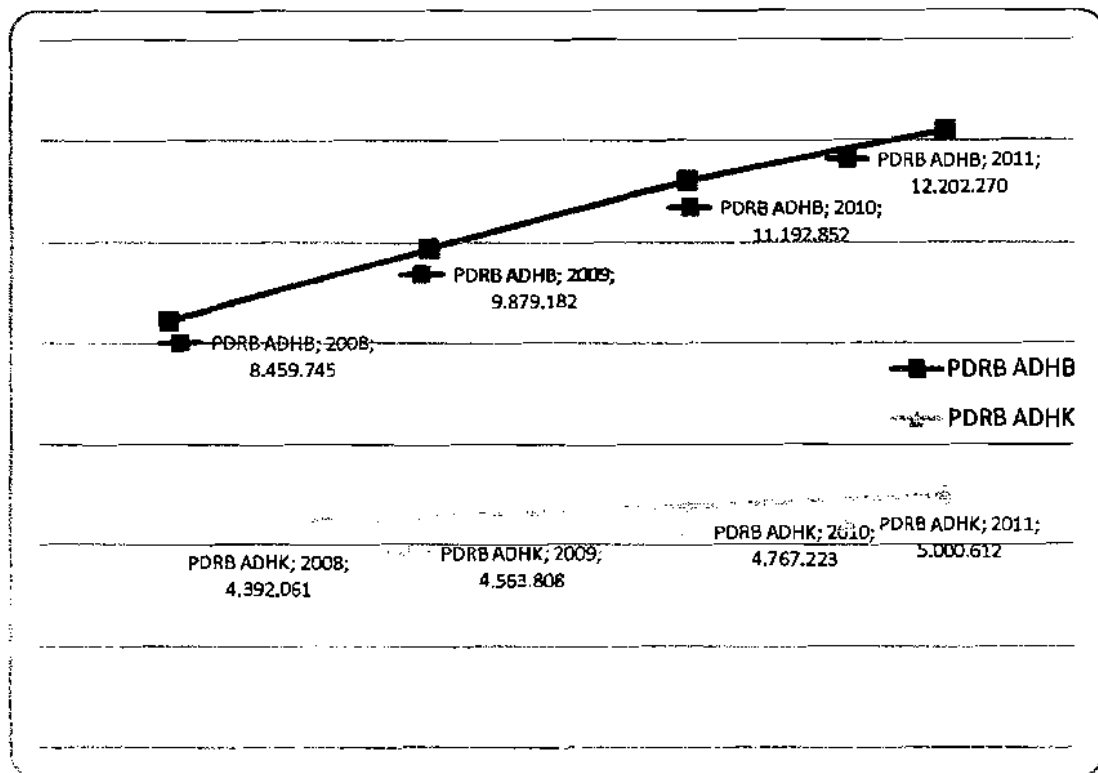
* Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB perkapita penduduk yang disertai dengan upaya pengendalian peningkatan jumlah penduduk.

Gambar 5

PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008–2012 (Rupiah/jiwa)



Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012

e. Laju Inflasi

Angka inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Laju inflasi maka secara umum beberapa harga banyak yang lebih murah.

Di Bulan Mei 2012, Kota Kalianda mengalami inflasi. Kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan

olahraga memberikan andil dalam pembentukan inflasi di Kota Kalianda.

Sedangkan di Bulan Juni Kota Kalianda mengalami inflasi sebesar 0,69% sementara di Bulan Juli inflasi di Kota Kalianda sebesar 0,50%. Dari tujuh kelompok yang ada seluruhnya memberikan andil dalam pembentukan inflasi di Kota Kalianda (Tabel 9).

Tabel 9
Perkembangan Laju Inflasi di Kota Kalianda
Tahun 2012

Kelompok Pengeluaran	TAHUN 2012					
	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Umum	-0,1900	-0,2738	0,3007	0,1924	0,6884	0,4987
-Bahan Makanan	-0,3734	-0,4039	0,2050	0,1972	0,5151	0,1404
-Makanan Jadi, Minuman, Rokok, Tembakau.	0,1101	0,0719	0,0162	-0,0061	0,0926	0,0826
-Perumahan	-0,0358	0,0254	0,0026	-0,0070	0,0467	0,0514
-Sandang	0,0911	-0,0334	0,0282	0,0059	0,0251	0,1411
-Kesehatan	-0,0161	0,0226	0,0162	0,0018	0,0000	0,0447
-Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,0000	-0,0057	0,0000	0,0006	0,0048	0,0290
-Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,0341	0,0493	0,0325	0,0000	0,0042	0,0206

Sumber : Inflasi Kota Kalianda 2012

3.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2013

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.

Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi *supply* harus terus didorong melalui

kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas pertanian yang mempunyai *value added* yang tinggi.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa terlepas dari pengaruh perekonomian regional, nasional, maupun global. Berdasarkan proyeksi sementara atas dasar harga konstan Tahun 2000 dan apabila kondisi perekonomian regional dan nasional mengalami pertumbuhan yang positif, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2014 dapat berkisar antara 6% sampai dengan 7%. Berikut ini disajikan target ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 10

Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013

No	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,20-7,00
2	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	13.000.000-14.000.000
3	PDRB per Kapita ADHB (Rupiah/Jiwa)	13.500.000-14.500.000
4	Laju Inflasi (Persen)	4% ±1%

Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan 2013

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penerimaan Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 secara nominal target penerimaan daerah Kabupaten Lampung Selatan berjumlah Rp.1.132.549.066.668,68 atau naik 9,07% dari target penerimaan daerah tahun 2012 sebesar Rp. 1.027.170.360.971,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.128.938.087.696,05

sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 berjumlah Rp.64.981.609.675,00 dengan realisasi Rp. 80.245.882.369,74 dan pada tahun 2013 naik sebesar 16,23% menjadi Rp.74.061.773.525,00 dari target 2012. Walaupun secara umum terjadi peningkatan nominal Penerimaan Daerah dan PAD tetapi proporsi Dana Perimbangan (DAU dan DAK) terhadap total penerimaan daerah masih sangat dominan yakni sebesar 78,45%, sementara pendapatan asli daerah hanya memberi kontribusi sebesar 6,54% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,01%.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kondisi penerimaan daerah yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Selatan masih harus ditingkatkan, karena itu ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah penting dilakukan untuk mencapai target pendapatan selang 5 (lima) tahun sebagaimana proyeksi dalam RPJMD 2011-2015 dapat direalisasikan.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah maka perlu upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dengan memperhatikan azas keadilan atau kemampuan masyarakat serta tingkat jasa pelayanan pemerintah daerah;
- b. Pajak dan Retribusi Daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang kontra produktif terhadap investasi agar sejauh mungkin dapat dihindari, hal ini diharapkan agar lebih menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah; dan
- c. Pengembangan industri dan perdagangan secara langsung yang dapat mempengaruhi peningkatan potensi pendapatan daerah.

Mengingat kapasitas fiskal yang rendah maka pengelolaan keuangan daerah sepanjang periode 2013 dan pada perencanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2014 penting untuk memperhatikan prinsip efisiensi dengan tetap mengarahkan pemanfaatan dana secara efektif dalam rangka peningkatan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan pelayanan pada masyarakat pada umumnya dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.

Tabel 11
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2012-2014

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun Berjalan (2012)	Proyeksi/Target tahun Rencana (2013)	Proyeksi/Target Tahun 2014
i. Pendapatan Asli Daerah	80.245.882.369,74	74.061.773.525,00	81.467.950.877,50
1. Pajak daerah	29.411.978.646,50	22.263.373.000,00	24.489.710.300,00
2. Retribusi daerah	32.391.535.626,00	17.889.190.000,00	19.678.109.000,00
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.252.537.097,00	5.016.855.825,00	5.518.541.407,50
4. Lain-lain PAD yang sah	13.189.831.000,24	28.892.354.700,00	31.781.590.170,00
ii. Dana Perimbangan	857.480.062.821,00	888.534.414.387,68	977.387.855.826,45
1. Bagi hasil pajak/bukan pajak	55.495.239.821,00	41.484.800.387,68	45.633.280.426,45
2. Dana Alokasi Umum	686.434.133.000,00	769.867.834.000,00	846.854.617.400,00
3. Dana Alokasi Khusus	115.550.690.000,00	77.181.780.000,00	84.899.958.000,00
iii. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	191.212.142.505,31	169.952.878.756,00	186.948.166.631,60
1. Dana Hibah			
2. Dana Darurat			
3. Dana bagi hasil dari propinsi	49.410.342.505,31	37.794.078.756,00	41.573.486.000,60
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	100.158.800.000,00	102.158.800.000,00	112.374.680.000,00
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah	41.643.000.000,00	30.000.000.000,00	33.000.000.000,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.128.938.087.696,05	1.132.549.066.668,68	1.245.803.973.335,55

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Implementasi efektivitas pengelolaan keuangan harus tergambar dalam peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pembangunan (belanja langsung) dan mengurangi proporsi belanja tidak langsung (belanja rutin) dalam rangka mewujudkan keberpihakan anggaran pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2012 proporsi belanja tidak langsung masih sebesar 54,79% dari total belanja, sementara pada tahun 2013 sebesar 59,57% dari total belanja. Struktur belanja daerah tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 12. Proporsi Belanja tidak langsung harus dapat ditekan pada tahun-tahun yang akan datang. Belanja daerah akan lebih diarahkan untuk memenuhi pembiayaan sektor unggulan daerah dan upaya untuk memicu laju pertumbuhan sektor tersier yang dapat memberikan dampak multiguna.

Tabel 12

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2012-2014

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun Berjalan (2012)	Proyeksi/Target Tahun Rencana (2013)	Proyeksi/Target Tahun 2014
1	2	3	4	5
2.1	Belanja Tidak Langsung	612.045.850.836,00	674.507.674.148,68	741.958.441.563,75
2.1.1	Belanja Pegawai	573.425.625.836,00	638.470.686.568,00	702.317.755.225,00
2.1.2	Belanja Bunga		20.000.000,00	22.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi		9.084.157.500,00	9.992.573.250,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.093.037.000,00	1.808.654.000,00	1.989.519.400,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20.872.708.000,00	22.109.042.000,00	24.319.946.200,00
2.1.8	Belanja Tidak terduga	6.654.480.000,00	3.015.134.080,68	3.316.647.488,75
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	612.045.850.836,00	674.507.674.148,68	741.958.441.563,75
2.2	Belanja Langsung	504.690.198.212,00	457.850.865.980,00	503.635.952.578,00
2.2.1	Belanja Pegawai	46.201.302.811,00	52.011.235.768,00	57.212.359.345,00
2.2.2	Belanja barang Jasa	183.073.183.352,00	208.857.261.070,00	229.742.987.177,00
2.2.3	Belanja Modal	275.415.712.049,00	196.982.369.142,00	216.680.606.056,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	504.690.198.212,00	457.850.865.980,00	503.635.952.578,00
	Jumlah	1.116.736.049.048,00	1.132.358.540.128,68	1.245.594.394.141,75

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan bukan hanya untuk menutupi defisit yang disebabkan lebih besarnya belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, selain itu juga adanya kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun berjalan tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal dan adanya dana retensi pembangunan yang memang belum bisa dicairkan pada tahun berjalan. Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 s/d 2014

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun Berjalan (2012)	Proyeksi/Target Tahun Rencana (2013)	Proyeksi/Target Tahun 2014
1	2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan	85.251.543.351,22	13.364.542.460,00	14.700.996.706,00
3.1.1	SILPA Tahun sebelumnya	85.234.993.351,22	13.364.542.460,00	14.700.996.706,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	16.550.000,00		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.251.543.351,22	13.364.542.460,00	14.700.996.706,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.366.730.653,00	13.555.069.000,00	14.910.575.900,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah		2.000.000.000,00	2.200.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	7.366.730.653,00	11.555.069.000,00	12.710.575.900,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.366.730.653,00	13.555.069.000,00	14.910.575.900,00
	Jumlah	92.618.274.004,22	26.919.611.460,00	29.611.572.606,00

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kebijakan pembangunan pada tahun 2014 tetap mengacu pada RPJMD 2011-2015. Berbagai perbaikan kondisi ekonomi selama tahun 2011 yang merupakan tahun pertama RPJMD dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 diharapkan menjadi indikator bahwa pembangunan Kabupaten Lampung Selatan semakin mendekati visi yang ingin dicapai. Untuk itu upaya yang konsisten dalam melanjutkan kebijakan pembangunan menjadi taruhan dalam pencapaian kondisi terbaik yang menjadi harapan sambil tetap melakukan koreksi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai kebutuhan dan tuntutan pembangunan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan Visi, Misi yang tertuang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagaimana table berikut.

Tabel 14

Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan Visi, Misi Kabupaten Lampung Selatan

Visi / Misi 1	Tujuan 2	Sasaran 3
Visi: Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang Maju dan Sejahtera Berbasis Ekonomi Kerakyatan		
Misi: 1. Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan sosial.	Misi 1 ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial.	Sasaran dari misi 1 adalah tercapainya peletakan dasar pembangunan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental.
1. Meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.	Misi 2 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan guna memperkuat	Sasaran dari misi 2 adalah tercapainya revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan.

	ekonomi yang telah berkembang di masyarakat.	
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.	Misi 3 ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang.	Sasaran dari misi 3 adalah tercapainya pengembangan dan perkuatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
3. Mengembangkan masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia.	Misi 4 ditujukan untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan yang membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.	Sasaran dari misi 4 adalah tercapainya masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia.
5. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Misi 5 ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Sasaran dari misi 5 adalah tercapainya pelestarian fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global.
6. Meningkatkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis	Misi 6 ditujukan untuk mendukung pemantapan kemampuan dan peningkatan	Sasaran dari misi 6 adalah tercapainya pemantapan kelembagaan demokrasi yang

	<p>profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat.</p>	<p>kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.</p>
<p>7 .Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berorientasi kemitraan, dan bertatakelola yang baik.</p>	<p>Misi 7 ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah bertatakelola yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan professional.</p>	<p>Sasaran dari misi 7 adalah tercapainya pemerintahan daerah yang berorientasi pada kewirausahaan (entrepreneurial government) yang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha.</p>

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2014 secara garis besar dirumuskan dalam 3 (tiga) agenda utama, yaitu :

a. Agenda Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Agenda ini dilaksanakan melalui penciptaan pemerintahan yang tercegah dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang diiringi dengan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilandasi oleh semangat dan tekad bersama mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan individu, kelompok maupun golongan, penegakan supremasi hukum, pengembangan nilai, norma dan etika lokal sebagai sumber hukum dalam masyarakat, serta pencapaian fungsi pelayanan yang optimal.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis juga secara maksimal harus ditempuh dengan mengembangkan instrumen pengawasan, pengendalian dan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dalam aspek sistem maupun komitmen dan integritas pelaksana pengawasan,

pengendalian dan evaluasi internal. Disamping itu, ruang publik untuk memperoleh informasi, memberi pendapat dan berkontribusi dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan tetap terus didorong untuk menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan nyata masyarakat (*the real societal needs*) sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis. Pelibatan seluruh elemen masyarakat sejak dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai dengan menikmati hasil-hasil pembangunan perlu tetap dipelihara dan diperluas. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan.

b. Agenda Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan Yang Maju Dan Sejahtera Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Perwujudan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan maju dan sejahtera Tahun 2015 dilakukan melalui upaya-upaya membebaskan masyarakat dari belenggu yang menghambat pencapaian potensi dirinya secara hakiki. Fungsi pemerintah lebih ditekankan pada usaha meningkatkan kapasitas dan kualitas kehidupan warga masyarakat, terutama melalui kinerja perekonomian, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, dan meminimalkan ketimpangan. Pemerintah juga wajib mewujudkan masyarakat sejahtera melalui demokratisasi ekonomi yang ditekankan pada orientasi pembangunan melibatkan masyarakat yang bekerja dalam beberapa sektor dominan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan industri terutama dalam konteks pemanfaatannya.

Disamping itu perlunya implementasi otonomi desa yang diharapkan akan membuat aparat pemerintah daerah lebih terbuka dan akuntabel sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal terutama dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin di desa. Hal yang tak kalah pentingnya juga dalam mewujudkan masyarakat adalah ditempuh melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Selanjutnya, Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui pemerataan kesempatan berusaha secara luas kepada seluruh warga masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan sosial (pendidikan

yang terjangkau, pembebasan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu/ jamkesmas, dan lain-lain), yang dilangsungkan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta sesuai dengan tantangan perubahan yang semakin nyata dibutuhkan saat ini serta asumsi-asumsi indikator ekonomi makro diatas, percepatan pembangunan dan pertumbuhan suatu wilayah maupun antar wilayah perlu lebih didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan dan pemerataan bagi masyarakat dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, koordinatif, dan terpadu antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Untuk itu, berbagai terobosan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2014 dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi menuju Lampung Selatan yang lebih maju dan sejahtera antara lain adalah:

1. Pengembangan dan pembangunan jaringan infrastruktur wilayah, dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan jalur alternatif transportasi lintas pesisir;
 - b. Pengembangan daya dukung pembangunan jembatan selat sunda;
 - c. Pengembangan daya dukung pembangunan jalan Tol Bakauheni, Babatan, Natar dan Terbanggi besar;
 - d. Pengembangan daya dukung pembangunan kota baru di Kecamatan Jati Agung;
 - e. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perumahan;
 - f. Pengembangan dan rehabilitasi jalur transportasi ekonomi perdesaan; dan
 - g. Pengembangan jalur transportasi mendukung sektor pariwisata daerah.

2. Pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata daerah, dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pada objek wisata unggulan Kabupaten Lampung Selatan (objek wisata way belerang dan pulau sebesi);
 - b. Pengembangan dan pembangunan objek wisata budaya, pantai dan bahari yang berfungsi sebagai penunjang objek wisata unggulan dan aneka atraksi wisata; dan

- c. Melakukan promosi pariwisata, baik melalui media massa dan atau elektronik serta even-even promosi pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Mendorong dan meningkatkan minat investor swasta untuk menanamkan investasinya dalam bidang kepariwisataan, salah satunya melalui pembangunan hotel berbintang di Kecamatan Kalianda.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM berbasis sumber daya dan potensi lokal, serta optimalisasi semua keunggulan wilayah yang dimiliki dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

C. Agenda Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan diberbagai sektor. Namun demikian, sebagai akibat adanya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang pada akhirnya mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata diseluruh wilayah.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi existing yang ada, pembangunan berbasis kewilayahan ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan diberbagai bidang pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, dengan melihat hal tersebut di atas dan dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah dan antar wilayah, pada tahun 2013 telah dilakukan pengembangan produk unggulan untuk masing-masing kecamatan (*one district one product*) berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa guna memperkuat perekonomian di tingkat kecamatan, dengan tujuan utama untuk :

- a) Menciptakan lapangan kerja dan berusaha;
- b) Memaksimalkan nilai tambah;

- c) Inergitas program, efisiensi dan efektivitas anggaran;
- d) Meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
- e) Menggerakkan perekonomian daerah; dan
- f) Pecepatan pembangunan daerah, khususnya di tiap-tiap Kecamatan sesuai dengan karakteristik dan unggulan korporatif yang ada.

Adapun produk unggulan setiap kecamatan yang telah disepakati tersebut adalah sebagaimana table berikut ini .

Tabel 15
Program Unggulan Per Kecamatan dan Instansi Penanggungjawab

NO	KECAMATAN	PROGRAM UNGGULAN	DINAS/ INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
1	Natar	Industri Kecil	Dinas Koperindag
2	Jati Agung	Peternakan Ayam	Dinas Peternakan
3	Tanjung Bintang	Budidaya Air Tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Tanjung Sari	Ternak Sapi	Dinas Peternakan
5	Merbau Mataram	Kakao	Dinas Perkebunan
6	Way Sulan	Keripik Pisang	Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian TPH
7	Katibung	Kakao	Dinas Perkebunan
8	Candipuro	Kelapa Sawit	Dinas Perkebunan
9	Sidomulyo	Jasa Perdagangan	Dinas Koperindag
10	Penengahan	Belimbing Merah	Dinas Pertanian TPH
11	Palas	Budidaya Air Tawar	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Sragi	Buah Naga	Dinas Pertanian TPH
13	Ketapang	Minapolitan	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Bakauheni	Pariwisata	Dinas Pariwisata
15	Rajabasa	Pariwisata	Dinas Pariwisata
16	Way Panji	Pepaya California	Dinas Pertanian TPH
17	Kalianda	Pariwisata	Dinas Pariwisata



2	Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan secara luas	2. Memperluas akses pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan penyandang masalah sosial, Keluarga Berencana dan pengarusutamaan gender
3	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	3. Revitalisasi pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
4	Pengembangan UMKM dan Dana Pengguliran untuk Menurunkan Kemiskinan	4. Peningkatan Swasembada Pangan dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan 5. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan antisipasi serta penanggulangan bencana.
5	Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum	6. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan produk Unggulan Kecamatan 7. Pengembangan sektor industri, perdagangan dan UMKM melalui peningkatan investasi daerah dan Perluasan kesempatan kerja.
6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat	8. Peningkatan Iklim yang Kondusif bagi Kehidupan Umat Beragama, Sosial Kemasyarakatan, Budaya Hukum dan Politik 9. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
7	Pengembangan Kepariwisataaan Daerah	10. Peningkatan kinerja pelayanan pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SDM, manajemen, sarana prasarana, e-government dan kesejahteraan aparatur.
8	Pengembangan Olahraga Prestasi	11. Peningkatan Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta meningkatkan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.
9	Pengembangan Fasilitas Energi Konvensional dan Energi Terbarukan	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2014 memberi penekanan pada sektor-sektor yang diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, optimalisasi potensi daerah; pemerataan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, untuk itu seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 diharapkan dapat menjadi formula pembangunan yang utuh dan bersifat *pro poor*, *pro growth* dan *pro job* sebagaimana *triple track strategy* nasional. Secara garis besar program, kegiatan dan pendanaan perbidang diuraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM/KEGIATAN PER BIDANG :

1. BIDANG INFRASTRUKTUR

- a. Rencana Program : 30 Program
- b. Rencana Kegiatan : 133 Kegiatan
- c. Total Sumber Pendanaan : Rp. 234.370.951.940,-
terdiri dari :
 - 1. APBD Kabupaten : Rp. 216.700.951.940,-
 - 2. APBD Provinsi : Rp. 1.750.000.000,-
 - 3. APBN Murni : Rp. 15.920.000.000,-

2. BIDANG SOSIAL BUDAYA

- a. Rencana Program : 140 Program
- b. Rencana Kegiatan : 799 Kegiatan
- c. Total Sumber Pendanaan : Rp. 250.769.606.927,-
terdiri dari :
 - 1. APBD Kabupaten : Rp. 130.223.072.902,-
 - 2. APBD Provinsi : Rp. 49.655.334.025,-
 - 3. APBN Murni : Rp. 70.891.200.000,-

3. BIDANG EKONOMI

- d. Program : 89 Program
- e. Kegiatan : 350 Kegiatan
- a. Total Sumber Pendanaan : **Rp. 182.168.501.400,-**
terdiri dari :
 - 1. APBD Kabupaten : Rp. 84.401.112.400,-
 - 2. APBD Provinsi : Rp. 13.627.500.000,-
 - 3. APBN Murni : Rp. 78.664.889.000,-
 - 4. CSR : Rp. 5.475.000.000,-

II. TOTAL PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN TAHUN 2014

- a. Total Rencana Program 2014 : 259 Program
- b. Total Rencana Kegiatan 2014 : 1.282 Kegiatan
- c. Total Sumber Pendanaan 2014 : **Rp. 667.309.060.267,-**
terdiri dari :
 - 1. APBD Kabupaten : Rp. 431.325.137.242,-
 - 2. APBD Provinsi : Rp. 65.032.834.025,-
 - 3. APBN Murni : Rp. 165.476.089.000,-
 - 4. CSR : Rp. 5.475.000.000,-

Sedangkan seluruh rincian program, kegiatan, dan sumber pendanaan tercantum dalam lampiran RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 dilakukan melalui proses yang lebih intensif dan diliputi semangat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan perkembangan aspirasi dan kehendak masyarakat. Walaupun demikian secara sadar diakui bahwa RKPD Tahun 2014 ini tidak dapat memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap kompleksitas isu dan permasalahan yang ada di masyarakat, karena itu proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus-menerus dan berada pada jalur yang tepat (*an the right track*). Prioritas pembangunan pada tahun 2014 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada kondisi yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Tujuan dari perencanaan yang baik tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa ikhtiar dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh aparat pemerintah menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam RKPD 2014 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat tercurah secara maksimal dalam seluruh tahapan pembangunan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCHO MENOZA SZP